

**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KPU
STUDI PADA KPU PROVINSI RIAU**



TESIS

**DEWI SILVIA ARIANI
1520869004**

**Pembimbing I : Prof. Sri Zul Chairiyah, MA
Pembimbing II : Drs. Tamrin, M.Si**

**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG, JULI 2017

**IMPLEMENTASI PKPU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KPU
STUDI PADA KPU PROVINSI RIAU**



TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Komunikasi
Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Andalas*

DEWI SILVIA ARIANI
1520869004

**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, JULI 2017

ABSTRAK

Nama : Dewi Silvia Ariani
Program Studi : Tata Kelola Pemilu
Judul Tesis : Implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan KPU Studi Pada KPU Provinsi Riau

Hadirnya kebijakan PKPU No.1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik menjadi kabar baik bagi semua pihak, salah satunya pihak yang selama ini sering memohon informasi tentang pemilu di KPU. Seperti diketahui bahwa kebijakan tersebut mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Artinya peraturan ini bisa mempermudah para pencari data. KPU Provinsi Riau adalah salah satu lembaga melaksanakan peraturan tersebut. Namun terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan diantaranya kurangnya sarana dan prasarana pendukung, belum bersinerginya para staf KPU dalam melaksanakan PKPU nomor 1 tahun 2015, bank data yang belum lengkap terutama yang berhubungan dengan data pemilu dan lain-lain. Fenomena ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya aspek dari internal KPU itu sendiri. Dengan mempergunakan teori Charles O. Jones tentang implementasi kebijakan yang melihat pada 3 hal (organisasi, interpretasi dan aplikasi) serta melalui pendekatan kualitatif, hasil penelitian membuktikan bahwa tidak baiknya implementasi PKPU di Provinsi Riau disebabkan oleh kurang baiknya koordinasi dalam organisasi KPU Provinsi Riau. Tiap sub bagian tidak saling terintegrasi dengan PPID selaku sub bagian yang berwenang dalam implementasi PKPU ini. Kemudian para pelaku kebijakan belum semuanya paham tentang PKPU tersebut sehingga sering terjadi salah pengertian sikap dari tiap sub bagian yang ada di KPU Provinsi Riau. Terakhir dari aspek aplikasi sudah berjalan cukup baik tapi tinggal melengkapi sebagian informasi yang tidak tersedia.

Key words: Implementasi kebijakan, PKPU, KPU, PPID, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

ABSTRACT

Nama : Dewi Silvia Ariani
Program Studi : Tata Kelola Pemilu
Judul Tesis : Implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan KPU Studi Pada KPU Provinsi Riau

The presence of PKPU No.1 / 2015 on public information management and service becomes good news for all parties, one of whom always asks for information about the election in KPU. As it is known that the policy regulates the management and service of public information. This means that this rule can facilitate the data seekers. Riau Province Election Commission is one of the institutions implementing the regulation. However, there are problems in the process of policy implementation such as lack of supporting facilities and infrastructure, not yet in synergies of KPU staffs in implementing PKPU number 1 of 2015, incomplete data banks especially those related to election data during 2004, 2009 and others. This phenomenon is caused by many factors including the internal aspects of the KPU itself. By using the theory of Charles O. Jones on the implementation of policies that look at 3 things (organization, interpretation and application) and through qualitative approach, the research result proves that the poor implementation of PKPU in Riau Province is caused by the lack of coordination in the organization of Riau Province Election Commission. Each sub-section is not integrated with PPID as the sub-division authorized in this PKPU implementation. Then the perpetrators of the policy have not understood all about PKPU is so often misunderstanding the attitude of each sub-section in the Riau Province KPU. The last aspect of the application has been running well but just complete the informations.

Key words: Implementation of policy, PKPU, KPU, PPID, Management and Information Public Service